

## RINGKASAN

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), karena tingkat kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas semakin meningkat tiap tahunnya. Pentingnya RUU P-KS adalah karena di dalam pasal-pasal tersebut berusaha melindungi dan memenuhi hak-hak terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang menyangkut persoalan perempuan non-disabilitas. Artinya, segmentasi RUU P-KS mencakup ragam kelompok di Indonesia, baik itu kelompok disabilitas maupun non disabilitas. Oleh karena itu, HWDI berusaha memperjuangkan RUU P-KS untuk segera disahkan melalui gerakan sosial.

Praktik gerakan sosial HWDI salahsatunya dapat dilihat dari serangkaian perjuangan HWDI dalam menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebagai kelompok minoritas, HWDI berusaha merepresentasikan perempuan penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemangku kebijakan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Jenis penelitian ini adalah studi lapangan, sehingga lokasi penelitian dilakukan di DKI Jakarta. Kemudian peneliti mewawancarai lima orang dari kalangan internal HWDI, dua orang dari Komnas Perempuan, dua orang dari DPR RI, dan satu orang dari Fraksi PKS. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan saat kasus pertama Covid-19 di DKI Jakarta. Terdapat beberapa kendala untuk mewawancarai narasumber secara langsung, akhirnya peneliti melakukan wawancara secara online.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pola perjuangan HWDI di DKI Jakarta dalam menuntut pengesahan RUU P-KS melalui gerakan sosial. Adapun strategi gerakan sosial yang dilakukan HWDI, yaitu membentuk struktur mobilisasi, *framing* isu, *long march*, demonstrasi, dan *lobbying* dengan DPR RI. Selain itu, terdapat faktor kontekstual yang mendukung dan menghambat. Faktor kontekstual yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran perempuan disabilitas terhadap RUU P-KS. Adapun faktor kontekstual yang menghambat adalah persepsi dan pemahaman kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan HWDI melakukan gerakan sosial adalah sebagai bentuk meruntuhkan *stigma* masyarakat bahwa kelompok perempuan penyandang disabilitas mampu untuk aksi turun ke jalan. Selain itu, draft RUU P-KS diyakini mampu melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, HWDI berusaha mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial, Penyandang Disabilitas, Gender, RUU P-KS.

## **SUMMARY**

*This research is based on an analysis of contextual politics, specifically the field of social movement which is considered as an important aspect in the dynamics of human life. It happens because social movements is a series of efforts that is united and collected to control every affected policy. Basically, the purpose of social movements is to control social-politics to the government as the elite politic who has right to make policy. In this case, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) as a minority group which fight over women's right for the disabilities through social movement.*

*One of HWDI's practices is a series of fight over the validation of RUU P-KS. As a minority group, HWDI tries to represent disability women to express their aspiration towards Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) as the policy manager. Hence, the purposes of this research are: first, to understand and describe the pattern of HWDI's fight over the validation of RUU P-KS. Second, to understand and elaborate the contextual factor which supporting and hampering HWDI in demanding the validation of RUU P-KS. The base of this research is structural perspectives and constructivism paradigm. The method of this research is qualitative with phenomenology approach. The type of this research is field research, so that the setting of the research is on DKI Jakarta. Moreover, the technique of selecting the informant is using purposive sampling. In collecting the data, the research use observation, interview, and documentation. Hence, this research used interactive analysis with the trustworthiness of triangulation.*

*The result of this research is elaborating about the fight pattern of HWDI in DKI Jakarta in demanding the validation of RUU P-KS through social movement. The strategies of social movement used by HWDI is creating mobilization, issue framing, long march, demonstration, lobbying with DPR RI. In addition, the are contextual factors that support and hinder. Contextual factor that support the increased awareness of women with disabilities towards the RUU P-KS. The contextual factor that hinders the perception and understanding of different interest groups. The purpose of their social movement is to overthrow the stigma in society that women with disability are able to make action. Beside that, the draft of RUU P-KS is believed to save the right of women with disability. So, HWDI tries to push DPR RI to validate RUU P-KS immediately.*

**Keywords:** *Social Movement, Disability, Gender, Public Policy.*